

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR24 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pemerintah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
18. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
19. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
20. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
22. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

23. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2026.
- (3) RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan RKPD provinsi.
- (4) RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB III SISTEMATIKA RKPD Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen;
 - b. Bab II gambaran umum kondisi daerah, memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan realisasi RPD, serta permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Bab III rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - d. Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026;

- e. Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD;
 - f. Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, memuat indikator Kinerja Tahun 2026;
 - g. Bab VII penutup.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RKPD Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana kerja yang terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pendanaannya dapat bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Dunia Usaha.

BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RKPD Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan Renja;
 - b. pelaksanaan Renja; dan
 - c. Hasil capaian Renja.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Program dan/atau kegiatan dan/atau Sub Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. target dan capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- c. target dan capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. target dan capaian Indikator SPM;
 - e. target dan capaian IKK; dan
 - f. target dan capaian Indikator TPB.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan didukung aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Hasil, Dampak dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan Kinerja daerah.
- (6) Perangkat Daerah membuat laporan Kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang Keluaran kegiatan dan indikator Hasil masing-masing Program, indikator capaian sasaran Perangkat Daerah.
- (7) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (8) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB VI
PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila Hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana Program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target Kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada RKPD Tahun 2026 merupakan Hasil penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri khususnya yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhir RPD Tahun 2025-2026 dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

9 Juli

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Juli 2025

→ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 24

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada RKPD Tahun 2026 merupakan Hasil penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri khususnya yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhir RPD Tahun 2025-2026 dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HIEMMY RIVAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah. Pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan yang multi dimensi, kesejahteraan diwujudkan dalam aspek ekonomi yang bersejajaran dengan aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara keberlanjutan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memerhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *Impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan sebelum penyusunan RKPD Tahun 2026, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *Impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan sebelum penyusunan RKPD Tahun 2026, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 5.101.500.000,00 | Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkok oh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); | Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance, Peningkata n pelayanan publik dan kinerja aparatur | - | | 5.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | J U M L A H | | | | | | 4.395.572.573.717,00 | | | | | | 9.191.607.641.810,00 | |

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|--|--|---|---|--|----------------------|---|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 5.101.500.000,00 | Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, DANA ALOKASI UNUM (DAU) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Mewujudkan Masyarakat dan Blokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove mance Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | - | | 5.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | J U M L A H | | | | | 4.395.572.573.717,00 | | | | | | | | 9.191.607.641.810,00 |

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON